

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan baik dari segi budaya dan alam nya. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara maritim, negara yang memiliki banyak laut dan kepulauan dan hal tersebut membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dibidang pariwisata. Karena msyarakat atau sektor swasta yang bisa bekerja sama dengan Pemerintah Kota untuk mengembangkan Pariwisata atau Sumber Daya Alam yang ada disetiap masing-masing daerahnya. Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 6: Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan-kebutuhan manusia untuk berwisata. Pasal 8: 1 Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2 Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. serta Pasal 12: 1 Aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata.<sup>1</sup>

Pada saat ini berkembang sebuah hal baru di dalam bentuk pariwisata, yaitu Pariwisata Halal adalah merupakan sebuah industri yang ditujukan untuk wisatawan muslim, akan tetapi setiap orang memiliki hak untuk berkunjung, dengan standarisasi yang telah dibuat. Mislanya pelayanan dalam pariwisata halal ini setiap hotel tidak menyediakan fasilitas minuman beralkohol dan tidak adanya fasilitas kolam renang dan ruangan spa nya terpisah antara wanita dan perempuan. Selain hotel yang memiliki standarisasi syariah, makanan yang disediakan harus makanan yang memiliki label halal, dan setiap transportasi yang membawa wisatawan harus memiliki suasana islami, misal nya adanya pemberitahuan adzan dan transportasi yang dinaiki siap mengantarkan para wisatawan untuk melaksanakan ibadah.

Pariwisata Halal tidak hanya sebuah fasilitas yang dituntut untuk memiliki standarisasi wisata halal, akan tetapi wisata halal menuntut tempat tujuan para wisatawan untuk memiliki standarisasi wisata halal, dimana setiap tempat wisata harus bersih dari pemalakan liar, dan tempat yang dikunjungi harus bersih dari sampah sehingga keluarga yang berkunjung dapat bermain bersama anak-anaknya dengan bebas. Dalam wisata halal juga dituntut bagi wisatawan untuk mengikuti dari segi penampilan, sehingga dengan penampilan yang lebih islami akan menguatkan sebuah destinasi tersebut merupakan sebuah tujuan dari wisata halal.

---

<sup>1</sup>[https://www.ekowisata.org/uploads/files/UU\\_10\\_2009.pdf](https://www.ekowisata.org/uploads/files/UU_10_2009.pdf)

Dalam hal tersebut membuat Indonesia tertarik untuk membuat wisata halal, sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama islam. dari hal tersebut ASITA (association Of The Indonesia Tours and Travel Agencies) memberikan paket wisata halal ketempat wisata religi. Walaupun wisata halal (halal tourism) tidak hanya terbatas pada wisata religi saja. Kementrian Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali.

Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang telah mengembangkan wisata halal untuk wisatawan muslim manca negara dengan cukup baik. Aceh yang dijuluki sebagai serambi mekah memiliki budaya islam yang cukup kental dan kuat dibandingkan daerah lain. Hal ini dilihat dari penerapan sistem berbasis syariah yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) masyarakatnya sehari-hari. Kementerian Pariwisata menargetkannya sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) yang digunakan untuk menarik wisatawan muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal (halal tourism) di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih tiga kategori.

Dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016 yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”. Berdasarkan data Kementerian

Pariwisata dan BPS pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp10,87 Triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa sector pariwisata di Aceh memiliki peran yang sangat penting. Selain Aceh, praktik wisata halal (halal tourism) juga mulai diterapkan di pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi NTB bekerjasama dengan MUI dan LPPOM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan UMKM melakukan sertifikasi halal pada restoran hotel.

Restoran non hotel, rumah makan dan UMKM. Tercatat terdapat 644 sertifikat halal yang sudah diterbitkan. Selain makanan halal, ketersediaan fasilitas ibadah juga sangat mudah ditemukan di NTB. Sebagai daerah dengan populasi muslim mencapai 90%, terdapat 4.500 masjid yang tersebar pada 598 desa dan kelurahan. Sehingga NTB juga dijuluki sebagai pulau seribu masjid. Indonesia berusaha mempromosikan halal tourism yang dimilikinya ke dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan mengikuti World Halal Tourism yang dilaksanakan di Abu Dhabi pada tahun 2016.<sup>2</sup>

Dari hal tersebut membuat Sumatera Barat khususnya Kota Padang tertarik untuk membuat Pariwisata Halal, karena melihat program wisata halal tersebut sangat cocok dengan program yang dibikin oleh Pemerintah Kota Padang Bapak Mahyeldi, sejauh ini kita lihat bapak Walikota Padang Mahyeldi selalu berusaha untuk membersihkan Kota Padang dari kemaksiatan. Saat ini beberapa tempat wisatawan sudah mulai bersih seperti Pantai Padang sebagai sentral para wisatawan sudah bersih dari adanya tenda-tenda ceper yang selama ini

---

<sup>2</sup>Eka Dewi Satriana, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan," Jurnal, Fakultas Ekonomi

meresahkan masyarakat yang selalu dianggap sebagai pusat kemaksiatan muda mudi yang datang kesana.

Dan dari hal tersebut, dengan adanya beberapa pembenahan tempat di beberapa tempat dan membersihkan tempat wisata, seperti dipantai padang kini Kota Padang telah mengalami peningkatan dari PAD nya. 2017 Kota Padang mengalami peningkatan pendapatan dari sektor pariwisatanya. Promosi 'jor-joran' yang dilakukan Pemerintah Kota Padang di sektor pariwisata membuahkan hasil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang di sektor ini melonjak hingga 29 persen sepanjang 2017. Pada tahun 2016 lalu, PAD di sektor pariwisata 'hanya' Rp 57 miliar. Sementara tahun 2017 ini, PAD sektor pariwisata Kota Padang menyentuh Rp 74 miliar, atau naik Rp 17 miliar dari tahun lalu.<sup>3</sup>

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa Sektor Pariwisata dapat menunjang atau meningkatnya perekonomian seseorang atau masyarakat disekitarnya. Sebagaimana yang kita ketahui di era globalisasi seperti saat sekarang pengelolaan pariwisata merupakan wadah atau langkah yang baik untuk dikembangkan agar masyarakat yang ada disekitarnya dapat membaut atau membangun sebuah usaha. Pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) akan menyelesaikan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Wisata Halal pada 2017 dan diajukan ke DPRD setempat awal 2018.<sup>4</sup>

Dan selain tempat rekreasi atau objek wisata tidak jauh dari sana sudah adanya fasilitas yang membantu wisatawan muslim untuk melaksanakan ibadan karena disekitaran sana adanya masjid untuk membantu wisatawan melaksanakan ibadah dan bagi para wisatawan yang luar yang datang ke Kota Padang dan

<sup>3</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/31/p1tw1y280-pemasukan-sektor-pariwisata-kota-padang-melonjak-29-persen>

<sup>4</sup> <https://www.sumbarprov.go.id/details/news/11064>

menikmati indah nya pantai padang mereka dapat menyewa penginapan di Hotel Rangkayo Basa sebagai penginapan yang merupakan salah satu hotel syariah yang ada di Kota Padang dan tempat nya tidak jauh dari pusat pariwisata. Sehingga wisatawan sangat mudah untuk menuju tempat-tempat rekreasi di Kota Padang, seperti Pantai Padang , Gunung Padang dan Pantai Air Manis.

Selain hotel dan tempat pariwisata, Kota Padang juga terkenal dengan kulinernya, setiap wisatawan dari luar pasti datang ingin menikmati kuliner yang ada di kota padang yang selama ini terkenal dengan surga nya kuliner, karena masakan padang terkenal dengan masakan rendang dan martabak mesir selain gulai-gulai yang ada. Dari hal tersebut membuat pemerintah Kota Padang ingin meraih keuntungan untuk meningkatkan APBD Kota Padang. Karena tidak dipungkiri lagi ketika wisatawan yang datang dari luar pasti ingin berburu kuliner di Sumatera Barat sehingga dengan hal tersebut juga sesuai dengan program wisata halal.

Dari hal tersebut tujuan pariwisata halal adalah untuk meningkatkan perekonomian di sebuah negara maupun di sebuah daerah, karena melihat sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan memberi lapangan pekerjaan tersendiri untuk masyarakatnya. Dan saat ini adanya perkembangan pariwisata halal menjadikan setiap negara ingin ikut serta membuat sebuah program tersebut karena banyak nya permintaan setiap masyarakat muslim sangat menginginkan adanya wisata halal sehingga bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah dan ingin makan yang halal sudah tidak bingung lagi karena sudah adanya pemandu dari guide yang menyediakan wisata halal.

Karena selama ini setiap wisatawan yang datang dari luar ke sebuah daerah atau negara tertentu apalagi negara tersebut notabene adalah non muslim selalu bingung ingin beribadah dimana dan mendapatkan makanan halal dimana, sehingga dengan adanya program ini akan membuat kenyamanan bagi para wisatawan untuk berpergian kemana mereka inginkan, dan dari hal tersebut akan menimbulkan kenyamanan dari para wisatawan untuk menikmati liburannya. Dan wisata halal juga memiliki peraturan- peraturan yang harus ditaati sesuai dengan ketentuannya, jika kita lihat dari sudut pandang MUI (Majelis Ulama Indonesia) salah satu lembaga yang mengatur halal dan haramnya di Indonesia memberikan sebuah peraturan atau sudut pandang oleh mereka.

Dan MUI memberikan sebuah data Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju operasional syariah. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi, Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi halal oleh MUI yang ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan minuman, dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-muslim dapat meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi. Indonesia melakukan sinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan wisata halal (halal tourism), contohnya Kementerian Pariwisata yang melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud

konkret kerjasama tersebut yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .<sup>5</sup> Dari hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata dapat menunjang atau meningkatkan di sektor ekonomi, karena yang kita ketahui saat ini di era globalisasi pengelolaan pariwisata merupakan wadah atau langkah yang baik untuk deikembangkan agar masyarakat yang ada disekitarnya dapat membuat atau membangun sebuah usaha, dengan hal demikian dapat mengurangi pengangguran yang ada.

Dan Pemerintah Kota Padang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang wisata halal pada tahun 2017 dan di ajukan ke DPRD setempat awal 2018. Dan saat ini masih dalam proses penyusunan naskah dan diperkirakan rampung pada akhir tahun ini. Sumba sudah mendapatkan predikat destinasi wisata halal, namun aturan hukumnya belum ada sehingga regulasi tersebut segera mungkin diselesaikan, jika telah adanya perda tentang pelaksanaan pariwisata halal sebagai landasan hukum maka akan tertata dan terkelola dengan baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dan terkait dari latar belakang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sedanggiatnya dalam mengusahakan agar tercapainya sebuah program disektor pariwisata yaitu adanya pariwisata halal, yang mana dibeberapa daerah Indonesia telah mulai merealisasikan program tersebut. Karena tidak mungkin jika Kota Padang juga mampu mewujudkannya, dan dalam hal ini tidak hanya Pemerintah

---

<sup>5</sup>Ibid Eka Dwi Satriana



Kota Padang yang dituntut agar terwujudnya pariwisata halal di Kota Padang, dari berbagai sector swasta harus ikut menyokong agar terwujudnya pariwisata halal. Dengan bersinerginya antara sektor swasta dan pemerintah Kota Padang itu akan memudahkan program ini dapat terealisasi dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap pariwisata halal?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bentuk- bentuk pengembangan pariwisata halal di Kota Padang
2. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pariwisata halal

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki mafaat :

- a. **Secara Akademik**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran pada ilmu sosial umumnya dan ilmu politik.
- b. **Secara Teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.
- c. **Secara Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pariwisata agar dapat meningkatkan Pariwisata yang ada di Kota Padang.

